

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI
NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : EVA FITRI YUANITA
NPM : 2141021032
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr. A.P.)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI
NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : EVA FITRI YUANITA
NPM : 2141021032
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Eva Fitri Yuanita
NPM : 2141021032
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan
Keluarga Anti Narkoba pada Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Analysis of the Implementation of the Anti-Drug
Family Resiliencse Policy by the National
Narcotics Board Republic Indonesia*

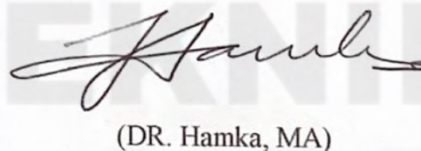
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(DR. Mala Sondang Silitonga, MA)

Pembimbing II



(DR. Hamka, MA)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : EVA FITRI YUANITA
NPM : 2141021032
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Program Studi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
Konsentrasi : **MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK**
Judul Tesis : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KETAHANAN KELUARGA ANTI
NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada;

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024
Pukul : 08.00 – 09.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang Dr. Firman Hadi Rivai, MPA
Sekretaris Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA
Anggota Dr. Edy Sutrisno, M. Si
Pembimbing 1 Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing 2 Dr. Hamka, MA



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Eva Fitri Yuanita
NPM	2141021032
Jurusan	Administrasi Publik
Program Studi	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Semua sumber yang dirujuk maupun tidak dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Juni 2024

Yang membuat pernyataan


The signature is in blue ink and is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '97ALX205900132'. The background of the page has a large, faint watermark of the Politeknik STIA LAN Jakarta logo.

Eva Fitri Yuanita

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Badan Narkotika Nasional”. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr. A.P) pada Program Magister Terapan, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan andil dalam proses penulisan tesis ini :

1. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA dan Bapak Dr. hamka, MA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran dan kontribusi yang konstruktif untuk proses penulisan tesis ini;
2. Dr. Firman Hadi Rivai, MPA selaku Ketua dosen penguji yang juga memberikan berbagai masukan dalam penelitian ini;
3. Bapak Prof. Dr. R Luki Karunia, MA selaku Sekretaris dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam menyempurnakan penelitian tesis ini;
4. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M. Si selaku Anggota dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam menyempurnakan penelitian tesis ini;
5. Seluruh dosen pengajar pada Magister Manajemen Kebijakan Publik Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama menjalani perkuliahan;
6. Seluruh tenaga kependidikan Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan serta Bagian Perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan sampai dengan pelaksanaan sidang akhir;
7. Para Narasumber yang berdedikasi di bidang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba Deputy Pencegahan BNN RI, Bapak Irjen Pol. Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, SH., MH., Direktur Advokasi BNN RI Bapak Brigjen Pol. Drs. Jafriedi, MM., Penyuluh Narkoba Ahli Madya Direktorat Advokasi BNN RI, Ibu Dian Anggraini, SE., M. Si, Rachman Arief, SH, MH, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Direktorat Hukum Deputy, Miftakhul Khoir, S.Psi,

M.Si, Perencana Ahli Muda BNN RI, Ade Aulia, *Programme Director UNODC Indonesia*, Purwoko, M.Si, Koordinator tim P2M BNN Kota Depok, Ibu X, Praktisi Pencegahan.

8. Keluarga besar penulis, Bapak Eddy Rusmianto dan Ibu Hj. Fachrunnisa, Ibu Husnah dan anggota keluarga Bekasi, Mampang dan Malang yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini;
9. Suami penulis, Khairul Umam S.Pd dan 4 anak-anak sholeh yang juga sedang berjuang dalam pendidikan, tesis ini bunda angkat sebagai bentuk kasih sayang bunda membentuk keluarga yang bersinar, bersih narkoba, inshaa allah;
10. Tim penyuluh madya, muda dan pratama serta tim di Direktorat Advokasi BNN RI yang telah membantu dalam melaksanakan pengambilan data;
11. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu termasuk follower #materikaeva.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Eva Fitri Yuanita

ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Eva Fitri Yuanita, Mala Sondang, Hamka

evafitri.bnn@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan saling terintegrasi. Dalam Peraturan Kepala BNN nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN 2020-2024 menyebutkan sasaran program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada deputi bidang pencegahan dilakukan dengan cara meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pelibatan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Informan pada penelitian ini adalah pemangku kebijakan bidang pencegahan serta praktisi pencegahan yang melaksanakan program ketahanan keluarga bersama BNN baik di level pusat hingga kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa penetapan prioritas masalah yang didapatkan adalah ketahanan keluarga anti narkoba di BNN RI dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan yang mengadaptasi pencegahan berbasis bukti yang telah teruji secara internasional sehingga sangat tepat jika hal ini didukung dengan optimalisasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh BNN RI sebagai *leading sector* dalam upaya pencegahan narkoba melalui penguatan keluarga.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan; Ketahanan Keluarga Anti Narkoba; Program Berbasis Bukti.

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of the Anti-Drug Family Resiliencse Policy by the National Narcotics Board Republic Indonesia

Eva Fitri Yuanita, Mala Sondang, Hamka

evafitri.bnn@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Preventing and controlling drug abuse requires holistic and integrated efforts. In the Regulation of the Head of BNN number 6 of 2020 concerning the 2020-2024 BNN Strategic Plan, it is stated that one of the targets of the program for preventing and eradicating drug abuse and illicit trafficking in deputies in the field of prevention is to be carried out by increasing the family's deterrence against the bad effects of narcotics abuse and illicit trafficking through the involvement of various sector that must be addressed with strong coordination from both the central and regional levels. The aim of this research is to analyze the implementation of the Anti-Drug Family Resilience Policy at the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative methods by conducting interviews, observation and documentation. The data source in this research uses secondary data and primary data. The informants in this research are policy makers in the field of prevention and prevention practitioners who implement family resilience programs with the BNN at both the central and district/city levels. According to the findings of the analysis, the anti-drug family resilience at BNN RI was the issue that was prioritized. This was done as an activity program that adapted evidence-based prevention that had been tested internationally. Therefore, it was very appropriate if this was supported by optimizing the anti-drug family resilience policy. The National Narcotics Board of the Republic of Indonesia's anti-drug family resilience policy isn't yet perfect. One of the reasons is that there is not any statutory or policy regulations issued by BNN as the leading sector in efforts to prevent drugs through strengthening families.

Keywords: Policy Implementation, Anti-Drug Family Resilience, Prevention, evidence-based prevention.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	19
A). Tinjauan Kebijakan	19
B) Kebijakan Pencegahan	25
C) Tinjauan Teoritis.....	28
Model Implementasi Kebijakan	28
(1) Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn	28
(2) Model Implementasi Kebijakan Mazmanian & Sabatier	31
(3) Model Kebijakan George C. Edwards III.....	33
(4) Model Kebijakan Merile S. Grindle	35

(5) Model Implementasi Kebijakan Richard E. Matland.....	38
(6) Teori Pencegahan	41
(7) Teori Pencegahan Narkoba Berbasis Bukti.....	42
(8) Standar Internasional Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Bukti.....	45
(9) Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	48
C. Kerangka Berfikir.....	50
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian.....	53
B. Teknik dan Waktu Penelitian	53
C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknis Pengolahan dan Analisis Data.....	57
E. Instrumen Penelitian.....	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Pembahasan.....	64
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
A. KESIMPULAN	106
B. SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Harapan, Kenyataan, Masalah, dan Dampak	9
Tabel 2.1	Ambiguitas Matland	41
Tabel 3.1	Pertanyaan Matland	53
Tabel 3.2	Pertanyaan Kunci Implementasi Kebijakan Publik	54
Tabel 3.3	Responden dan Alasan Pemilihan	54
Tabel 4.1	Matriks diolah penulis	71



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Mandat UNODC “Instrumen-instrumen terkait narkoba, kejahatan dan terorisme”	2
Gambar 1.2	Prevalensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia.....	4
Gambar 1.3	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur (Persen) 1970 -2040 ..	6
Gambar 2.1	<i>Policy Cycle</i>	23
Gambar 2.2	<i>Policymaking Process</i>	24
Gambar 2.3	<i>Model of the Policy Implementation Process</i>	30
Gambar 2.4	<i>Skeletal Flow Diagram of the Variables Involved in the Implementation Process</i>	31
Gambar 2.5	<i>Model of the Policy Implementation Process</i>	33
Gambar 2.6	Implementasi Kebijakan Sebagai Proses Administrasi Dan Politik	37
Gambar 2.7	Matriks Ambiguitas Matland	38
Gambar 2.8	Model Efektifitas Kebijakan Matland (Kadji)	40
Gambar 2.9	<i>Evidence-Based Hierarchy</i>	43
Gambar 2.10	Kerangka Berfikir Penelitian	50
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BNN RI.....	60
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Deputy Bidang Pencegahan.....	61
Gambar 4.3	Undang Undang No.10 Tahun 1992	64
Gambar 4.4	Matriks RUU Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	65
Gambar 4.5	Sasaran Pencegahan dan Model Intervensi Pencegahan.....	67
Gambar 4.6	Kerangka Kerja Logis BNN 2020-2024	69
Gambar 4.7	Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan Deputy Bidang pencegahan BNN 2020-2024 disertai target	70
Gambar 4.8	Modul Ketahanan Keluarga	74
Gambar 4.9	Modul Pendukung Program Kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga ..	75
Gambar 4.10	Modul Update 2023 untuk Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba UNODC-BNN.....	76
Gambar 4.11	Bentuk Kolaborasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.....	79

Gambar 4.12	Regulasi Pemerintah Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2023 yang mendorong partisipasi masyarakat dalam Implementasi Ketahanan Keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba	83
Gambar 4.13	Pelatihan Fasilitator Ketahanan Keluarga Anti Narkoba untuk Kader TP PKK Depok dari tingkat kota, 11 Kecamatan dan 2 Kelurahan	84
Gambar 4.14	Workshop Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Surakarta, 2022.....	85
Gambar 4.15	Rapat Kerja Teknis Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Untuk Fasilitator BNNP, Jakarta 12-14 April 2022.....	86
Gambar 4.16	Alat Ukur Anti Drug Scale (ADS) 01 – 2017 Kuesioner Faktor yang Mempengaruhi ADS	87
Gambar 4.17	Logic Model of Family United Programme.....	90
Gambar 4.18	Sejarah Program Keluarga Anti Narkoba di BNN RI.....	91
Gambar 4.19	Fasilitator Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang telah dilatih baik internal maupun mitra BNN RI.....	92
Gambar 4.20	Skema pencegahan Narkoba Berbasis Bukti untuk Kebijakan Ketahanan keluarga Anti Narkoba	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Utama kepada *Key Informan*
- Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Presentase Perubahan Kondisi Sesudah Intervensi di Jawa Barat ...81



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

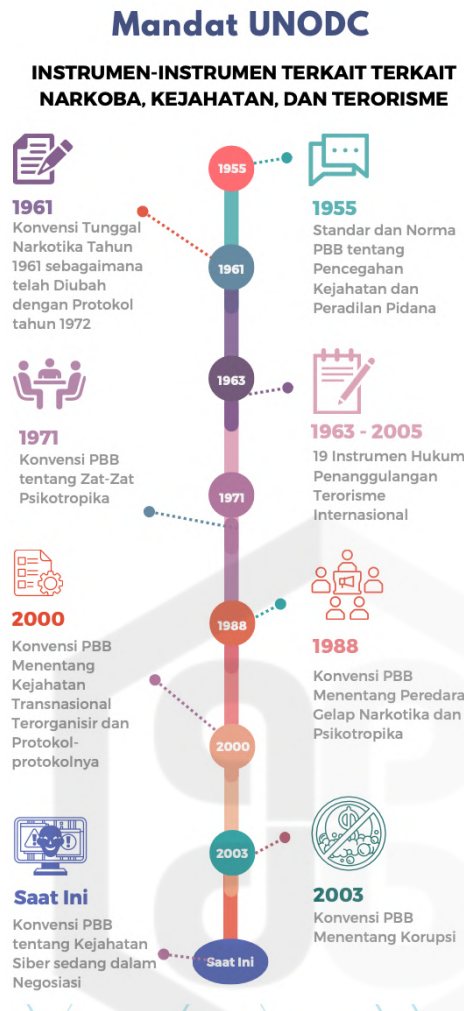
BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Bulan September 2015 meluncurkan SDGs. Peluncuran SDGs merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan capaian agenda global sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*) yang sudah banyak merubah wajah dunia 15 tahun kearah yang lebih baik. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan ntuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". 17 tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum) (Bappenas, 2017).

Untuk mensukseskan pencapaian 17 tujuan SDGs yang dicanangkan oleh negara-negara di dunia. Indonesia menunjukkan komitmen tinggi yaitu dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017 oleh Presiden, dan dibentuk tim koordinasi SDGs Nasional di bawah koordinasi Kepala Bappenas (RI, 2017). Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan atau dikenal juga dengan UNODC bertugas mengawal konvensi-konvensi terkait narkoba, kejahatan dan terorisme serta protokolnya bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk memerangi tantangan terkait narkoba dan kejahatan. Bantuan teknis yang diberikan oleh UNODC kepada negara anggota dalam bentuk bantuan teknis, penelitian dan panduan normatif kepada mitra bertujuan untuk membantu merandang dan melaksanakan tanggapan yang komprehensif dan berbasis bukti terhadap ancaman yang kompleks dan saling terkait yang dihadapi baik di tingkat nasional, regional serta global.



Gambar 1.1 Mandat UNODC “Instrumen-instrumen terkait narkoba, kejahatan dan terorisme”

Sumber: PGC Meeting UNODC Indonesia, 2024

Badan Narkotika Nasional sebagai *leading sector* dalam permasalahan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memiliki program tematik Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang merupakan program prioritas pembangunan nasional yang menjadi salah satu program dalam upaya pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera (*good health and well-being*).

Perdagangan gelap narkoba terjadi di berbagai negara dunia dengan dinamika yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut meliputi jenis narkoba yang beredar, kelompok kejahatan narkoba yang melakukan peredaran, dan modus operandi yang dilakukan. Perkembangan pasar narkoba di dunia mempengaruhi pola jaringan kejahatan peredaran narkoba. Tingginya minat narkoba jenis sabu, setelah ganja, membuat peningkatan produksi sabu dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari trend penyalahgunaan narkoba secara internasional. Indonesia sendiri adalah pasar narkoba yang penting dunia khususnya untuk jenis ATS (*Amphetamine Type Stimulants*).

Sementara itu terkait perkembangan NPS (*New Psychoactive Substance*) di dunia berdasarkan data *Early Warning Advisory* UNODC per Desember 2021 terdapat 1.212 zat psikoaktif baru yang juga menjadi ancaman kesehatan, akan tetapi tidak berada dalam peraturan *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 maupun pada *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971. Konteks “baru” ini bukan selalu berarti merupakan zat yang baru karena sebenarnya sudah ada dari beberapa dekade lalu, akan tetapi baru banyak beredar di masyarakat. Di Indonesia sendiri saat ini peraturan yang menjelaskan terkait ini adalah Permenkes Nomor 9 dan 10 Tahun 2022 yang mengatur 75 zat baru dari 84 zat yang teridentifikasi masuk ke Indonesia (Kemenkes, 2022b, 2022a).

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) (RI, 2009). Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, BNN memiliki Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018-2045. Dokumen ini merupakan perencanaan jangka Panjang BNN yang berfokus pada upaya penguatan institusional untuk merespon perkembangan potensi ancaman kejahatan narkoba di tengah megatrend global yang sangat cepat. (BNN, 2018). *Grand Design* BNN kemudian menjadi acuan atau rujukan arah dan kebijakan jangka menengah BNN terkait agenda penguatan institusional dalam rangka merespon perubahan lingkungan strategis ancaman kejahatan narkoba.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2021, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan penduduk Indonesia pada rentang usia 15-16 tahun dalam setahun terakhir adalah 1,95 % atau setara dengan

3.662.646 jiwa (BNN, 2022). Sementara itu data UNODC mencatat pada tahun 2014 bahwa satu dari dua puluh orang dewasa mengonsumsi satu jenis narkoba dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus (UNODC 2016). Pada tahun 2016, UNODC mencatat bahwa sekitar 13,8 juta (56%) penduduk usia antara 15-16 telah menggunakan kanabis/ganja (UNODC 2018). Berdasarkan data dari Indonesia *Drugs Report*, sepanjang tahun 2021, BNN dan POLRI telah berhasil mengungkap sejumlah 41.084 kasus dengan jumlah total tersangka 53.405 tersangka (Puslitdatin, 2022). Sepanjang tahun 2021, BNN telah mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba baik nasional maupun internasional. Jaringan sindikat narkoba internasional yang paling banyak diungkap berasal dari *golden triangle* dan *golden crescent*. BNN juga mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari hasil kejahatan narkoba.



Gambar 1.2 Prevalensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia

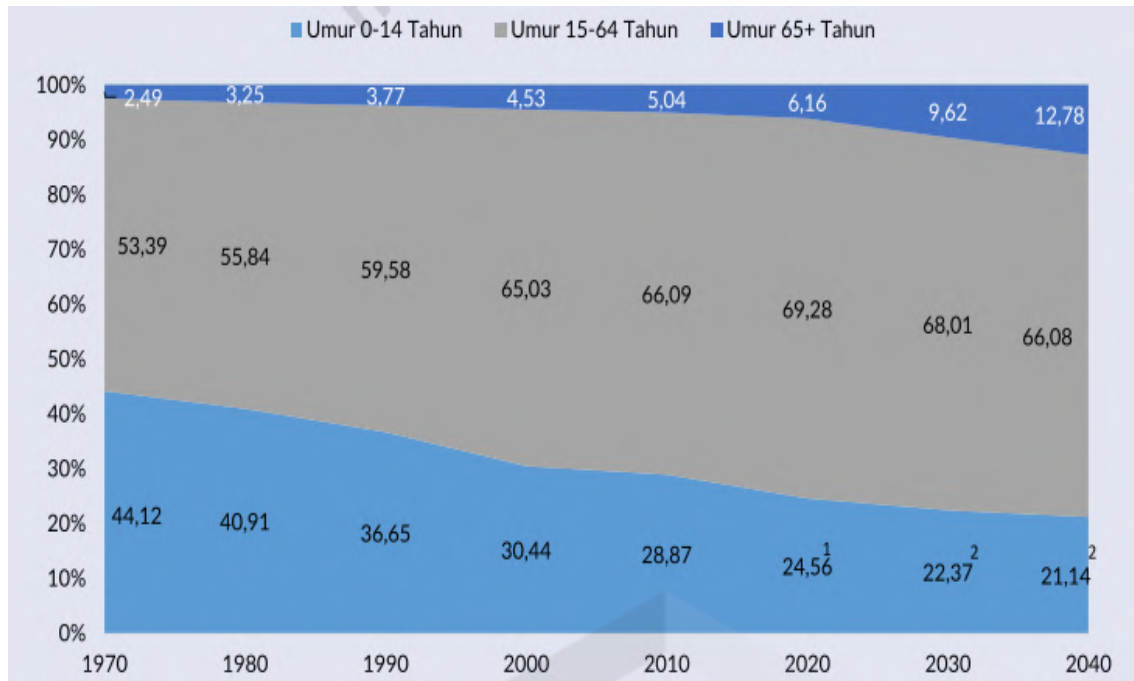
Sumber: (Puslitdatin, 2022)

Dengan banyaknya jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia, maka BNN sebagai *leading sector* penanggulangan permasalahan narkoba telah menyatakan perang melawan narkoba dengan pendekatan strategi yang komprehensif dengan pendekatan

mulai dari lingkungan makro, lingkungan meso hingga lingkungan lingkungan mikro yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh lingkungan pribadi dan keluarga terhadap individu. (BNN, 2018).

Seiring berjalannya kebijakan P4GN, Kepala BNN juga mengeluarkan strategi *war on drugs* dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba, yaitu *soft power approach*, *hard power approach* dan *smart power approach* (BNN, 2021b). Strategi *soft power approach* adalah tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Strategi ini menekankan program P4GN pada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Strategi *hard power approach*, merupakan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba. *Smart power approach* adalah penanggulangan permasalahan narkoba dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan memaksimalkannya di era digital ini dalam segala aspek P4GN.

Deputi Bidang pencegahan sebagai satuan kerja yang melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan sebagai rujukan pelaksanaan kinerja kedeputian dengan merujuk kepada Peraturan Kepala BNN nomor 6 Tahun 2020-2024. Deputi Pencegahan bergerak dalam sisi *demand reduction* melalui sasaran strategis program dan kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Deputi Bidang Pencegahan di tahun 2020 menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai petunjuk bagi satuan kerja vertikal di BNN serta Kementerian /Lembaga guna mendukung implementasi kebijakan ketahanan keluarga. Dalam petunjuk pelaksanaan ini disebutkan kegiatan intervensi yang dilakukan dengan sasaran keluarga dapat berupa penyuluhan, seminar, workshop, peningkatan *lifeskills*, *employee assistance program* dan *family gathering*.



Gambar 1.3 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur (Persen) 1970 -2040

Sumber: (BPS, 2022)

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Bonus demografi memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan tingkat perekonomian bangsa apabila dapat dimanfaatkan dengan optimal. Untuk maksud tersebut, penduduk usia produktif harus berada dalam kondisi yang prima, yaitu sehat, cerdas, dan produktif. Penduduk usia produktif yang berkualitas, baik dari sisi pendidikan, karakter, dan kompetensi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena penduduk usia produktif merupakan aktor utama pembangunan nasional (BPS, 2022). Peran bidang pencegahan BNN sangat penting dalam mempersiapkan daya tangkal masyarakat dengan menggunakan pendekatan mikro melalui lingkungan keluarga di periode bonus demografi ini.

UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) sebagai salah satu organisasi internasional narkoba dan kriminal merupakan salah satu organisasi

internasional pembuat kebijakan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba baik dalam upaya pencegahan, rehabilitasi maupun pemberantasan yang menjadi rujukan oleh negara-negara di dunia serta melakukan berbagai riset dan kajian terhadap berbagai program yang berkaitan dengan narkoba serta criminal lainnya. Dalam bidang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, UNODC melakukan riset dan kajian dalam upaya pencegahan berbasis bukti dengan melakukan intervensi pencegahan bahaya narkoba untuk keluarga, salah satunya mengembangkan *The Strong Families Programme*. Program ini berdampak positif setelah diujicobakan kepada keluarga yang tinggal di negara dengan latar belakang konflik yaitu Afganistan (UNODC, 2019). Program untuk keluarga ini kemudian dikembangkan di tahun 2019 menjadi program berjudul *Family United* dengan menyasar keluarga yang belum pernah menyalahgunakan narkoba serta telah dilakukan riset dan kajian oleh UNODC sebagai salah satu program pencegahan berbasis bukti. Program *Family United* ini diadaptasi oleh pemerintah Indonesia melalui BNN RI menjadi program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba cenderung memiliki pengetahuan yang cukup terkait dampak penyalahgunaan narkoba dibanding bukan penyalahguna narkoba. Selain itu, disebutkan pula bahwa penyalahguna narkoba cenderung memiliki kedekatan emosional dengan keluarga (orangtua/pasangan) yang lebih rendah dibandingkan dengan penyalahguna narkoba. Edukasi berbasis keluarga perlu menekankan tidak hanya pentingnya frekuensi (intensitas) komunikasi dan kedekatan emosi, tetapi juga kualitas interaksi yang dibangun dalam keluarga, termasuk dalam membentengi keluarga dari bahaya narkoba (BNN, 2022). Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal kehidupan dari seorang individu untuk dapat mengambil keputusan, baik itu yang benar maupun yang salah. Ketika Individu mulai beranjak remaja dan memiliki kehidupan lain di luar keluarga, peran keluarga menjadi penting untuk membantu melindungi anak dari pengaruh negatif yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat. Keyakinan bahwa “penyalahgunaan narkoba” adalah “penyakit keluarga” menunjukkan pentingnya program intervensi yang melibatkan berbagai elemen pencegahan yang komprehensif, antara lain melibatkan keluarga/orangtua (Kumpfer, 2014). Intervensi keluarga adalah hal krusial dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tidak ada strategi keluarga terbaik untuk

pencegahan penyalahgunaan narkoba, tetapi strategi harus disusun untuk mempertimbangkan kebutuhan budaya (Kumpfer & Alvarado, 1995).

Pentingnya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba mulai dari keluarga dapat dipahami melalui beberapa aspek kunci. Interaksi awal anak-anak terjadi dalam keluarga sebelum mereka mulai bersekolah. Keluarga memainkan peran sentral dalam pembentukan perilaku dan nilai-nilai individu, termasuk dalam hal menghindari penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor seperti pengasuhan yang gagal atau kurang terampil, kesulitan kesehatan, dan masalah keuangan, terutama dalam lingkungan yang terpinggirkan secara sosial-ekonomi atau keluarga yang disfungsi, dapat mengembangkan kerentanan pada anak-anak. Selain itu, asupan alkohol, nikotin, dan narkoba selama kehamilan berdampak negatif terhadap perkembangan embrio dan janin. Keadaan seperti ini dapat menghambat pencapaian kompetensi perkembangan yang signifikan dan membuat anak rentan terhadap gangguan perilaku di kemudian hari. Upaya untuk menguatkan ketahanan keluarga anti narkoba mengacu pada kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini berarti keluarga memiliki strategi, pengetahuan, dan sumber daya yang cukup untuk melindungi anggotanya dari bahaya narkoba. Dengan memperkuat ketahanan keluarga, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung, di mana anggota keluarga merasa dihargai, dicintai, dan dipahami, sehingga mereka kurang cenderung mencari pelarian dalam bentuk narkoba. Langkah pencegahan yang berfokus pada keluarga tidak hanya memberikan perlindungan kepada individu, tetapi juga membangun komunitas yang lebih sehat dan lebih kuat secara keseluruhan.

Rekomendasi hasil penelitian tentang pertahanan aktif (*active defence*) dalam pencegahan peredaran gelap narkoba tahun 2020 mendukung penelitian ini, yaitu BNN direkomendasikan untuk segera menyusun panduan praktis, bahkan pendampingan-pendampingan teknis kepada instansi dan aparat di daerah untuk merumuskan program, anggaran, dan pelaksanaan program-program P4GN di wilayahnya (BNN, 2021a).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di BNN RI antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2021, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan penduduk Indonesia terdapat pada rentang usia 15-16 tahun dalam setahun terakhir adalah 1,95 % atau setara dengan 3.662.646 jiwa (BNN, 2022) serta menunjukkan peningkatan penggunaan pada jenis narkoba jenis baru (NPS).
2. Hasil pengukuran indeks ketahanan keluarga anti narkoba tahun 2021 menunjukkan angka 81,43 yang cukup tinggi, sementara data dari Indonesia Drugs Report oleh BNN dan POLRI, sepanjang tahun 2021, data kasus terkait penyalahgunaan narkoba sebanyak 41.084 kasus dengan jumlah total tersangka 53.405 tersangka (Puslitdatin, 2022).
3. Nilai indeks ketahanan keluarga yang rendah belum menjadi rujukan untuk pengembangan program ketahanan keluarga bagi pelaksana kegiatan.
4. Belum adanya regulasi berupa dokumen nasional kebijakan pencegahan di BNN terkait ketahanan keluarga anti narkoba.

Tabel 1.1 Tabel Harapan, Kenyataan, Masalah, dan Dampak

Harapan	Kenyataan	Masalah	Dampak
Tercapainya sasaran strategis Bidang Pencegahan dalam Renstra BNN (BNN, 2020b).	1. Hasil penelitian prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah 1,95% (BNN, 2022) 2. Hasil Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba pada tahun 2021 menunjukkan angka 81,43 (Advokasi, 2021) 3. Data hasil ungkapan kasus sepanjang tahun 2021 BNN dan POLRI adalah sejumlah 41.084 kasus dengan jumlah total tersangka 53.405 tersangka (Puslitdatin, 2022).	Bidang pencegahan BNN belum memiliki standar nasional kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang komprehensif.	Daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba rendah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan ketahanan keluarga pada Deputy Bidang Pencegahan?
2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di Deputy Bidang Pencegahan dapat lebih optimal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menggambarkan implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba pada Deputy Bidang Pencegahan BNN RI
2. Untuk memperoleh strategi untuk implementasi yang lebih optimal terkait kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba pada Deputy Bidang Pencegahan BNN RI.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pendidikan dan upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis :
 - a. Memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu pendidikan khususnya pengetahuan implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba sebagai informasi tambahan bagi penyusun kebijakan terkait pencegahan narkoba.
 - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan optimalisasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba.

2. Manfaat Praktis :

- a) Deputi Bidang Pencegahan: sebagai bahan masukan khususnya terhadap strategi kebijakan pencegahan yang berbasis bukti serta sebagai rekomendasi untuk penyusunan standar nasional pencegahan narkoba.
- b) Masyarakat : sebagai informasi terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba berbasis bukti (*evidence based prevention*).



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di BNN RI. Implementasi kebijakan ini didukung oleh beberapa faktor pendukung, namun juga menghadapi beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan secara maksimal.

BNN RI memiliki peran strategis dan landasan yang kuat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menjadikan kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba sebagai panduan dan kerangka kerja bagi berbagai pihak. Berikut ini adalah kesimpulan yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan :

1. Dalam konteks implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di BNN RI, faktor-faktor yang mendukung seperti Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan memiliki korelasi langsung dengan dimensi-dimensi implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Richard Matland. Ketepatan Pelaksanaan yang dilakukan BNN RI dilaksanakan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif.
2. Sementara itu, faktor penghambat seperti Ketepatan Kebijakan yang menjadi salah satu tantangan dalam implementasi, dalam konteks implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di BNN RI, penyesuaian kebijakan dengan situasi aktual di lapangan menjadi kunci dalam mengatasi faktor penghambat dan memastikan keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa Dimensi Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan merupakan aspek yang mendukung implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di BNN RI sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di BNN RI antara lain adalah Dimensi Ketepatan kebijakan.

Strategi prioritas dapat dilakukan oleh BNN RI meliputi pendekatan kebijakan pencegahan berbasis bukti, koordinasi lintas lembaga dengan mitra internasional seperti UNODC dan nasional seperti K/L terkait dan organisasi PKK, serta penguatan sumber daya dan kapasitas pegawai. Strategi lainnya adalah BNN RI perlu memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program. Dengan adanya rencana dukungan anggaran untuk RPJMN 2025-2029 serta perluasan program melalui kemitraan dengan organisasi dan kementerian terkait merupakan strategi yang sangat penting untuk keberlanjutan program. Strategi lainnya adalah penguatan sumber daya manusia dan anggaran merupakan langkah kunci dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba berbasis bukti di BNN RI.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran yang dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan di BNN RI adalah sebagai berikut:

- a. Dalam konteks kebijakan, direkomendasikan agar BNN RI mengeluarkan regulasi khusus terkait Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dalam bentuk Instruksi Presiden yang dapat memperluas jejaring BNN RI dalam menguatkan pencegahan bahaya narkoba melalui keluarga kepada Kementerian/Lembaga terkait lainnya, maupun dalam bentuk peraturan badan atau peraturan kepala BNN RI yang akan menjangkau internal BNN RI khususnya pada level pembina fungsi dan vertikal kelembagaan BNN RI. Termasuk melakukan diseminasi hasil analisis implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba yang dilakukan oleh peneliti yang juga merupakan pegawai dalam satuan kerja pembina fungsi Deputi Bidang Pencegahan serta komitmen dalam penguatan kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba oleh BNN RI.
- b. Penelitian ini juga menyarankan dilakukannya kolaborasi intensif dengan lembaga pemerintah maupun organisasi lainnya, untuk mengimplementasikan kebijakan dan program pencegahan narkoba secara terintegrasi. Kolaborasi lintas sektoral ini akan memperkuat efektivitas, kapasitas dari pelaksana kebijakan serta penguatan berkelanjutan dalam bidang penelitian, evaluasi, dan implementasi program pencegahan narkoba berbasis bukti.

- c. Dalam konteks penelitian yang dapat dilakukan di masa yang akan datang, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba yang dikeluarkan oleh BNN RI bagi Kedeputian Pencegahan di BNN RI. Serta penelitian yang mengkaji kebijakan pencegahan narkoba dengan sasaran lainnya seperti lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja sesuai dengan target sasaran pencegahan oleh BNN RI di masyarakat yang berkaitan dengan pemangku kebijakan lainnya.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Advokasi, D. .2022. *Petunjuk Teknis Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba*.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. .2018. *Studi Evaluasi Kebijakan : Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia*. Ideas Publishing.
- Anderson, J. E. .2003. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company. *Mifflin Company*.
- Angkawijaya, Y. F. .2019. *Analisis instrumen organizational commitment : modified dengan pendekatan mix method*. 8(5), 55.
- Bahramnejad, A., Iranpour, A., Karamoozian, A., & Nakhaee, N. .2020. Universal school-based intervention for increasing resilience, and its effect on substance use. *Children and Youth Services Review*, 118(August), 105378. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105378>
- Bappenas. .2017. Ringkasan Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. In *Kementerian PPN / Bappenas*.
- BNN. .2020a. *Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional*.
- BNN. .2020b. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024*.
- BNN. .2021a. *Pertahanan Aktif (Active Defense) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika 2020*.
- BNN. .2021b. *War On Drugs Press Release Kinerja BNN RI Tahun 2021*.
- BNN. .2022. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. www.bnn.go.id
- BPS, B. P. S. .2022. *Analisis Profil Penduduk Indonesia*. <https://www.bps.go.id/>
- Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. .2009. Evidence-based public health: A fundamental concept for public health practice. *Annual Review of Public Health*, 30, 175–201. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.031308.100134>
- Carroll, J., Green, T., & Noonan, R. .2018. Evidence-Based Strategies for Preventing Opioid Overdose: What’s Working in the United States. *Centers for Disease Control and Prevention*, 1–36.

- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. .2011. *Designing and Conducting Mixed Methods Research Third Edition* (Third Edit). SAGE Publications Inc.
- Creswell, J. W., & Creswell, D. J. .2018. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches Fifth Edition. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr
- Dunn, W. N. .2018. Public Policy Analysis An Integrated Approach Sixth Edition. In *News.Ge*. Taylor & Francis.
- Edwards III, G. C. .1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- EMCDDA. .2019. European Prevention Curriculum. In *Publications Office of the European Union*. www.emcdda.europa.eu
- Grindle, M. S. .1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. In *アジア経済*. Princeton University Press.
- Haar, K., El-Khani, A., Mostashari, G., Hafezi, M., Malek, A., & Maalouf, W. .2021. Impact of a Brief Family Skills Training Programme (“strong families”) on Parenting Skills, Child Psychosocial Functioning, and Resilience in Iran: A Multisite Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph182111137>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. .2017. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April).
- HPIO. .2013. *Guide to evidence-based prevention*. December.
- Kemenkes, R. .2022a. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*.
- Kemenkes, R. .2022b. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*.
- Knill, C., & Tosun, J. .2008. Policy Making. *Environmental Policy in the EU: Actors, Institutions and Processes*, 209–226. <https://doi.org/10.4324/9780203109823-25>
- Knoepfel, P., Nahrath, S., & Varone, F. .2007. Institutional Regimes for Natural

- Resources: An Innovative Theoretical Framework for Sustainability (2007). *Environmental Policy Analyses*, January. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-73149-8>
- Kumpfer, K. L. .2014. Family-Based Interventions for the Prevention of Substance Abuse and Other Impulse Control Disorders in Girls. *ISRN Addiction*, 2014, 1–23. <https://doi.org/10.1155/2014/308789>
- Kumpfer, K. L., & Alvarado, R. .1995. *Strengthening Families to Prevent Drug Use in Multi-Ethnic Youth*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Lavner, J. A., Barton, A. W., Adesogan, O., & Beach, S. R. H. .2021. Family-Centered Prevention Buffers The Effect Of Financial Strain On Parenting Interactions, Reducing Youth Conduct Problems In African American Families. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 89(9), 783–791. <https://doi.org/10.1037/ccp0000680>
- Lesondak, D. .2018. Fascia, what it is and why it matters. *CDC*.
- Marciniak, A. .2017. “Prevention of Evil, Production of Good”: Jeremy Bentham’s Indirect Legislation and its Contribution to a New Theory of Prevention. *History of European Ideas*, 43(1), 83–105. <https://doi.org/10.1080/01916599.2016.1251719>
- NHS. .2018. Prevention is Better Than Cure. *GOV.UK*.
- Nugroho, R. .2017. Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Opara, I., Lardier, D. T., Reid, R. J., & Garcia-Reid, P. .2019. “It All Starts With the Parents”: A Qualitative Study on Protective Factors for Drug-Use Prevention Among Black and Hispanic Girls. *Affilia - Journal of Women and Social Work*, 34(2), 199–218. <https://doi.org/10.1177/0886109918822543>
- Puslitdatin, B. .2022. *Indonesia Drugs Report 2022*.
- RI. .2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. 1, no 1.
- RI, R. I. .2017. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- RI, R. I. .2020. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024*.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. .1980. Conceptual Framework, The Implementation of

- Public Policy : A Framework of Analysis, Universitas of California and Pomona College. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Singh, S., Balhara, Y. P. S., Gupta, P., & Christodoulou, N. G. .2020. Primary and secondary prevention strategies against illicit drug use among adults aged 18–25: a narrative review. *Australasian Psychiatry*, 28(1), 84–90.
<https://doi.org/10.1177/1039856219875048>
- Smith, T. B. .1973. The policy implementation process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209.
<https://doi.org/10.1007/BF01405732>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. .2019. *Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia*. 1(2).
- UNODC. .2002. *Action to Promote Effective Crime Prevention*.
- UNODC. .2019. *Family United Supplementary Materials*.
- UNODC. .2021. *International Standards on Drugs Use Prevention Second Updated Edition*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. .1975. The Policy Implementation Process. *Sage Publication, Inc.* <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, S. A. .2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. .2020. *Metoldologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research R&D*. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.